

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : BOOK CHAPTER

Judul Buku : Menarik Pelajaran dari 50 Tahun Perjalanan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia “Tantangan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan dan Pembangunan Perkotaan bagi Kabupaten dengan Tingkat Urbanisasi Tinggi”

Jumlah Penulis : 1 penulis

Status Pengusul : **Fadjar Hari Mardiansjah**

Identitas Buku :

- a. Judul Buku : Menarik Pelajaran dari 50 Tahun Perjalanan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia.
- b. ISBN : 9786029056044 6029056042
- c. Edisi : Cetakan I
- d. Tahun Terbit : Juni 2011
- e. Penerbit : ITB berkerjasama dengan Yayasan Sugijanto Soegijoko
- f. Jumlah halaman : 374
- g. Alamat Web : <https://www.worldcat.org/title/menarik-pelajaran-dari-50-tahun-perjalanan-perencanaan-wilayah-dan-kota-di-indonesia/oclc/761384025>

Kategori Publikasi Karya Ilmiah : ☒ *Book Chapter*

Buku(beri ✓ pada kategori yang tepat)

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional 	Nasional 10	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)		1	1,0
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3	3,0
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	2,0
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/buku (30%)		3	2,0
Total = (100%)		10	8,0
Nilai Pengusul : 100% x 8,0 = 8,0			

Catatan Penilaian artikel oleh *Reviewer*:

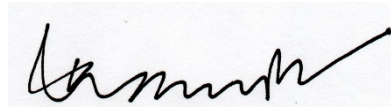
- a. Unsur isi buku lengkap dan juga unsur artikelnya yang dimulai dengan lintasan pengamatan perkembangan kota dari tahun 2000 dan 2010 dan pembahasan tentang permasalahan dan pentingnya pengembangan kebijakan, kompetensi dan kapasitas pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten. Isi dari artikel *book chapter* merepresentasikan judul yang diangkat dengan kata kunci kapasitas pengelolaan dan pembangunan perkotaan.
- b. Penulisan artikel mencakup pembahasan tentang perkembangan kota di Indonesia, permasalahan kelembagaan, dan pengelolaan kelembagaannya. Artikel sesuai dengan bidang penulis terutama dalam

konteks manajemen kota dan wilayah. Pembahasan dalam artikel buku melibatkan total 16 pustaka yang semuanya merupakan artikel jurnal (100%).

- c. Pustaka yang digunakan sebanyak 16 dimana sebagian besar (75%) merupakan artikel jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Metode yang digunakan cukup mutakhir dengan cara perbandingan pengelolaan kelembagaan di beberapa kabupaten.
- d. Penerbit ITB bekerjasama dengan Yayasan Sugijanto Soegijoko yang memiliki jaringan lokal-nasional. Artikel tidak dilengkapi dengan DOI dan termasuk katagori *book chapter* nasional. Terdapat informasi *editorial board* dan ber-ISBN dengan jumlah penulis/*contributors* sebanyak 23.

Semarang, 30-03-2021

Reviewer 1,



Dr.sc.agr. Iwan Rudiarto S.T., M.Sc.
NIP. 197403271999031002
Departemen PWK, FT. Undip

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : BOOK CHAPTER

Judul Buku : Menarik Pelajaran dari 50 Tahun Perjalanan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia “Tantangan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan dan Pembangunan Perkotaan bagi Kabupaten dengan Tingkat Urbanisasi Tinggi”

Jumlah Penulis : 1 penulis

Status Pengusul : **Fadjar Hari Mardiansjah**

Identitas Buku :

- a. Judul Buku : Menarik Pelajaran dari 50 Tahun Perjalanan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia.
- b. ISBN : 9786029056044 6029056042
- c. Edisi : Cetakan I
- d. Tahun Terbit : Juni 2011
- e. Penerbit : ITB berkerjasama dengan Yayasan Sugijanto Soegijoko
- f. Jumlah halaman : 374
- g. Alamat Web : <https://www.worldcat.org/title/menarik-pelajaran-dari-50-tahun-perjalanan-perencanaan-wilayah-dan-kota-di-indonesia/oclc/761384025>

Kategori Publikasi Karya Ilmiah : ☒ *Book Chapter*
 Buku(beri ✓ pada kategori yang tepat)

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional 	Nasional 10	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)		1	0,7
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3	2
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	2,7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/buku (30%)		3	2,8
Total = (100%)		10	8,2
Nilai Pengusul : $8,2 \times 100\% = 8,2$			

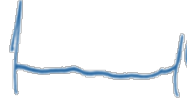
Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- a. Isi buku sesuai dengan ketentuan penulisan bab dalam kategori buku ontologi seperti terbitan tersebut.
- b. Pembahasan dilakukan secara mendalam, tetapi tidak jelas kaitannya dengan rujukan/referensi yang digunakan
- c. Penelitian ini menggunakan data terbaru, didukung referensi yang sangat relevan dan baru. Artikel ini membahas sesuatu yang jarang dibahas, yakni tentang kapasitas kelembagaan sebagai implikasi urbanisasi.

d. Penerbit oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) diterbitkan dengan bahasa Indonesia. Bekerjasama dengan Yayasan Sugijanto Soegijoko. Memiliki nilai kemiripan Turnitin sebesar 4%.

Semarang, 15 Juni 2021

Reviewer 2,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line and a small vertical stroke at the end.

Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP

NIP. 196605061995121001

Departemen PWK FT. Undip

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : BOOK CHAPTER

Judul Buku : Menarik Pelajaran dari 50 Tahun Perjalanan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia “Tantangan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan dan Pembangunan Perkotaan bagi Kabupaten dengan Tingkat Urbanisasi Tinggi”

Jumlah Penulis : 1 penulis

Status Pengusul : **Fadjar Hari Mardiansjah**

Identitas Buku :

- a. Judul Buku : Menarik Pelajaran dari 50 Tahun Perjalanan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia.
- b. ISBN : 9786029056044 6029056042
- c. Edisi : Cetakan I
- d. Tahun Terbit : Juni 2011
- e. Penerbit : ITB berkerjasama dengan Yayasan Sugijanto Soegijoko
- f. Jumlah halaman : 374
- g. Alamat Web : <https://www.worldcat.org/title/menarik-pelajaran-dari-50-tahun-perjalanan-perencanaan-wilayah-dan-kota-di-indonesia/oclc/761384025>

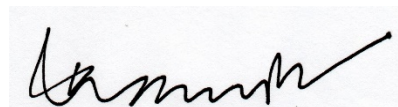
Kategori Publikasi Karya Ilmiah : ☒ *Book Chapter*

Buku(beri ✓ pada kategori yang tepat)

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Reviewer		Nilai Rata-rata
	Reviewer I	Reviewer II	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	1,0	0,7	0,85
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	3,0	2	1,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	2,0	2,7	2,35
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/buku (30%)	2,0	2,8	2,4
Total = (100%)	8,0	8,2	8,1
Nilai Pengusul : 100% x 8,1 = 8,1			

Reviewer 1,



Dr.sc.agr. Iwan Rudiarto S.T., M.Sc.
 NIP. 197403271999031002
 Departemen PWK FT.Undip

Semarang,
 Reviewer 2,



Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP
 NIP. 196605061995121001
 Departemen PWK FT.Undip



Menarik pelajaran dari

50 TAHUN PERJALANAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA DI INDONESIA

Diterbitkan oleh :



PENERBIT ITB

bekerjasama dengan

**YAYASAN
SUGIJANTO SOEGIJOKO**



Menarik Pelajaran dari
**50 TAHUN PERJALANAN
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
DI INDONESIA**

Editor:

**Myra P. Gunawan
Siti Sutriah Nurzaman
Suwardjoko P. Warpani**

Penerbit:

Penerbit ITB bekerja sama dengan Yayasan Sugijanto Soegijoko

Data Katalog Dalam Terbitan (KDT):

Menarik Pelajaran dari 50 Tahun Perjalanan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia;
Editor: Myra P. Gunawan, Siti Sutriah Nurzaman, Suwardjoko P. Warpani; Pengantar:
Hetifah Sjaifudian; Penerbit: Penerbit ITB bekerjasama dengan Yayasan Sugijanto
Soegijoko, cetakan pertama Juni 2011.
374 hlm. + xxiii ; 18,2 x 25,7 cm.

Rancang sampul oleh Bagas Dwipantara Putra
Tata letak oleh Chairul Maulidi
Hak Cipta pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK),
Institut Teknologi Bandung

ISBN 000-0000-00-0

Buku ini diterbitkan sebagai penghargaan bagi guru, pembimbing, atasan, rekan kerja, serta sahabat para penulis:

Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko

yang selama lebih dari 4 dekade setelah lulus dari ITB, mencurahkan perhatian dan pikirannya untuk pengembangan keilmuan dan profesi perencanaan wilayah dan kota di
INDONESIA



Daftar Isi

Daftar Isi	i
KATA PENGANTAR	v
Wajah Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia <i>Hetifah Sjaifudian</i>	
PENDAHULUAN	
Permasalahan, Tantangan, Teknik, dan Metoda, serta Visi ke Depan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia <i>Myra P. Gunawan</i>	1
Bagian I : PERMASALAHAN PERENCANAAN DI INDONESIA	
1	
Pergeseran Konsepsi dan Pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota di Indonesia <i>Budhy Tjahjati S. Soegijoko</i>	13
2	
Pemikiran Perencanaan di Indonesia Berdasar Catatan Tahun 2004 <i>Kemal Taruc</i>	39
3	
Peran Strategis Perencanaan Pembangunan Wilayah dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi & Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah <i>Suprayoga Hadi</i>	59
4	
Mengawal dan Mengamankan Rencana Kota <i>Suhadi Hadiwinoto</i>	77
5	
Menyikapi Fenomena Ketidaksesuaian Lokasi Tempat Kerja dengan Tempat Tinggal (<i>Job-housing Mismatch</i>): Peluang Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Perencanaan Wilayah dan Kota <i>Ridwan Sutriadi</i>	91

6	Industri Kota Baru Swasta: Pelajaran dari Berbagai Kasus di Jabodetabek <i>Hari Ganie</i>	119
----------	--	-----

7	Megakota Jakarta: Persoalan Kebencanaan dan Pendekatan Penanganannya <i>Saut Sagala, Pudja Handika, M. Reza Arisandy</i>	129
----------	---	-----

Bagian II : TANTANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA

8	Tantangan dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur <i>Bambang Bintoro Soedjito</i>	145
----------	--	-----

9	Tantangan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan & Pembangunan Perkotaan bagi Kabupaten dengan Tingkat Urbanisasi Tinggi <i>Fadjar Hari Mardiansjah</i>	159
----------	---	-----

10	Membangun Masa Depan Tanpa Menghilangkan Masa Lampau: Kasus Bandung sebagai Basis Militer <i>Suwardjoko P. Warpani</i>	193
-----------	--	-----

11	Perubahan Iklim dan Tantangan Perencanaan Kota <i>Deden Rukmana</i>	207
-----------	--	-----

12	Peranan Penataan Ruang dalam Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia <i>Djoko S. Abi Suroso, Benedictus Kombaitan</i>	213
-----------	--	-----

Bagian III : PENDEKATAN DAN TEKNIK PERENCANAAN

13	Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman <i>Ruchyat Deni Djaka-permana</i>	221
-----------	---	-----

14		
	Analisis Skenario sebagai Alat Pemetaan Situasi Masa Depan yang Penuh Ketidakpastian	
	<i>Risfan Munir</i>	245
15		
	Metoda ‘Bedah Desa’ sebagai Alat Bantu Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan	
	<i>Tatag Wiranto</i>	261
16		
	Perencanaan adalah Proses Komunikasi yang Tak Henti: Kasus Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta 1998-2006	
	<i>Bambang S. Priyohadi</i>	283
17		
	Optimalisasi Media Sosial dalam Membangun Partisipasi Masyarakat	
	<i>Elkana Catur Hardiansah</i>	327
18		
	Karakteristik Wilayah Peri-urban pada Metropolitan Jabodetabekjur	
	<i>Delik Hudalah, Ishma F. Soepriadi, Louise Desrainy M.P.</i>	345
 Bagian IV : CATATAN PENUTUP		
	Mencari Visi Baru Perencanaan dari Paradigma ke Praksis	
	<i>Budhy Tjahjati S. Soegijoko</i>	363
 Resume Pemakalah		vii
Riwayat Hidup Prof. Ir. Budhy Tjahjati S. Soegijoko, MCP. PhD.		xv
Kesan dan Kenangan		xvii

Kata Pengantar:

Wajah Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia



Hetifah Sjaifudian

Anggota Komisi X DPR RI, 2009-2014

Ketua Alumni Planologi ITB (API)

Email: hetifah@gmail.com

Ada apa dengan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia? Pertanyaan ini muncul karena kegagalan para pemimpin untuk mewujudkan kota yang layak huni dan manusiawi di ibu kota maupun banyak tempat lain seantero nusantara. Perencana juga turut disalahkan karena kontribusi yang mereka berikan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, menangani bencana, dan kerusakan lingkungan, dianggap terlalu kecil. Banyak kota besar tumbuh tidak terkontrol. Para pengambil keputusan seperti lumpuh ketika menghadapi ketidakpastian dan berbagai ancaman serta isu yang terjadi di tengah masyarakat seperti konflik sosial.

Bukan berarti tidak ada keberhasilan yang telah ditunjukkan oleh para perencana wilayah dan kota di Indonesia. Beberapa bahkan merupakan kesuksesan yang spektakuler dan membanggakan. Namun keraguan akan efektivitas perencanaan wilayah dan kota untuk mengatasi dan mencegah berbagai persoalan pembangunan dan masalah sehari-hari semakin menguat. Profesionalisme seorang ahli tata kota dan wilayah pun dipertanyakan. Di sisi lain semakin disadari penanganan masalah penataan wilayah dan kota terlalu rumit jika diserahkan pada para politisi dan elit semata. Tangan dan pemikiran para perencana yang kompeten sangat dibutuhkan. Ada harapan besar Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota menjadi pusat perubahan, sehingga pola lama dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan penataan wilayah dan kota bisa tergantikan. Sistem lama dalam pengelolaan uang dan ruang yang korup dan kurang berpihak harus diganti dengan sistem baru yang lebih demokratis, adil, dan berbasis fakta.

Bagi almamater dan alumni Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, tentunya situasi ini menjadi tantangan besar. Menjalankan peran sebagai perencana ideal yang beretika memang bukan perkara mudah. Menerapkan ilmu yang diperoleh dalam suatu sistem yang kurang kondusif membuat sebagian alumni memilih untuk berkiprah dalam bidang lain. Jangan sampai antusiasme generasi muda untuk memilih profesi mulia ini merosot karena kurangnya penghargaan publik kepada para perencana wilayah dan kota.

Buku yang diterbitkan sebagai penghargaan kepada Ibu Budhy Tjahjati S. Soegijoko ini mengisi keingintahuan banyak orang tentang lingkup tugas seorang perencana wilayah dan kota, sekaligus menjawab kritikan terhadap profesi ini.

Karena buku ini sangat komprehensif, sumbangan pengalaman saya pribadi dalam pengantar ini hampir tidak ada artinya. Berdasar pengalaman berkiprah dalam dunia politik, hanya ada satu pemikiran yang dapat saya sumbangkan untuk menjelaskan mengapa perencanaan belum menjadi solusi utama berbagai persoalan pembangunan. Realitas menunjukkan pertimbangan politik terlalu banyak campur tangan dalam berbagai keputusan publik yang penting, sehingga tak jarang pertimbangan akal sehat, data, bukti, dan pendekatan teknis lain dalam perencanaan menjadi terabaikan.

Oleh sebab itu para alumni perencanaan wilayah dan kota hendaknya jangan terlalu naif dan apolitis. Buku ini dapat menjadi acuan untuk mengeksplorasi dinamika kekuasaan dan bagaimana para perencana dapat mengambil peran dalam dunia tersebut untuk mengoreksi keadaan.

Buku ini bukan hanya mengungkapkan refleksi dan realitas permasalahan yang ada beserta tantangan pengembangan kota dan wilayah, tapi juga mengemukakan berbagai pendekatan serta teknik perencanaan. Data dan peta adalah alat-alat analisis yang penting yang seharusnya tidak lagi diabaikan dalam pengambilan keputusan. Sebagai refleksi pengalaman setengah abad Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, berbagai data dan perkembangan pemikiran baru dikemukakan, mewakili mereka yang bergerak dalam berbagai bidang penting dalam lingkungan perencanaan wilayah dan kota. Kritikan yang datang dari dalam juga tak luput dikemukakan.

Selama lima puluh tahun, terminologi telah berganti, ribuan alumni telah diproduksi, tetap sulit mengukur capaian, karena ribuan produk rencana dan inovasi dalam pemikiran yang dihasilkan para alumni tidak terukur efektivitasnya, juga konsekuensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Inilah saatnya untuk merenung ulang. Apa perubahan yang sudah kita hasilkan, dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki peran dan produk seorang perencana wilayah dan kota? Bagaimana caranya? Membaca buku ini, kita bisa mendapatkan beberapa jawaban atas pertanyaan tersebut. Sejalan dengan kematangan berbangsa dan bernegara, kita harus yakin peran sebuah rencana yang dibuat secara berhati-hati dan bertanggung jawab akan semakin penting.

Akhir kata, keterlibatan seorang Ibu Budhy Tjahjati S. Soegijoko dalam bidang perencanaan wilayah dan kota menjadi simbol ketahanan dan kepercayaan diri perencana wilayah dan kota. Masuknya beliau di jurusan ini nyaris sama dengan usia jurusan itu sendiri. Dedikasinya tidak diragukan, bahkan sampai hari ini pun beliau tetap aktif menerapkan keahliannya. Oleh sebab itu, tak ada alasan untuk ragu. Sekali lagi, persoalan wilayah dan kota terlalu rumit untuk diserahkan pada politisi dan elit semata.

Hetifah Sjaifudian
Alumni Planologi ITB, angkatan 1982

Pendahuluan:

Permasalahan, Tantangan, Teknik, dan Metoda serta Visi ke Depan Perencanaan Wilayah Dan Kota di Indonesia

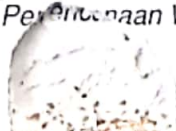
Myra P. Gunawan

Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, ITB

Email: myrapg@yahoo.com

Perjalanan panjang perencanaan wilayah dan kota yang dimaksud dalam BUKU ini diawali dari saat pendirian Bagian Tata Pembangunan Daerah dan Kota di Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1959, lebih dari 50 tahun yang lalu. Tidak berarti bahwa sebelumnya belum ada perencanaan daerah dan kota di bumi nusantara, karena sejak awal abad ke-20 pemikiran untuk penataan dan perencanaan kota sudah dilakukan. Adalah Karsten yang pada tahun 1921 menyampaikan makalah tentang *Indiesche Stedebouw* dalam suatu kongres tentang desentralisasi pemerintahan dengan mengatakan bahwa perencanaan kota merupakan kegiatan yang memadukan aspek teknologi, aspek sosial, dan estetika sebagai sesuatu yang baru dan mendapat sambutan di Hindia Belanda maupun di Negeri Belanda. Langkah lanjutannya berupa dibentuknya berbagai komite yang terkait dengan penataan ruang kota, yaitu Komite Garis Sempadan Bangunan (*Rooilijncommissie*), Komite Pembatasan Pembangunan (*Bouwbeperkingencommissie*), dan Komite Perencanaan Kota (*Stadvormingcommissie*). Komite Perencanaan Kota ini beranggotakan para walikota, arsitek, para pejabat, dan dipimpin oleh guru besar dalam bidang hukum. Tugas Komite, selain menyangkut hal teknis, juga menyiapkan produk hukum.

Pada awal kemerdekaan sistem pemerintahan segera berganti dan banyak kota dalam keadaan kacau. Untuk memastikan agar perencanaan dalam masa pasca perang dapat (akan) berlanjut normal, maka metodologi, organisasi, dan peraturan harus disesuaikan. Sebelum pembentukan Biro Perencanaan Pusat (*Central Planologisch Bureau*) pada tahun 1946, sempat terjadi perdebatan sengit antara pihak yang menganggap perlu dan tidaknya suatu badan tingkat pusat, dengan sudah adanya desentralisasi. Yang satu melihat pentingnya koordinasi dan kesejahteraan menyeluruh, yang lain lebih melihat kepada persoalan lokal setempat, permasalahan ini masih tetap hangat sampai sekarang. Pembentukan Biro Perencanaan Pusat ini digagas semula oleh Dr. Ir. W.B. Kloos yang kemudian dilanjutkan oleh J.P. Thijse, insinyur teknik sipil dari Kantor Pekerjaan Umum yang pada tahun 1946 diangkat sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teknik Bandung (ITB sekarang). Pembentukan organisasi pusat mempunyai dasar ideologis maupun praktis, karena luasnya nusantara yang mencakup perdesaan maupun perkotaan,



serta kekacauan multidimensi akibat perang. Saat itu hanya ada 15 orang profesional terlatih yang menangani perencanaan kota untuk seluruh nusantara yang jelas tidak memadai. Dalam kaitan dengan perencanaan Thijse berpendapat bahwa diperlukan tiga hal, yaitu: **keahlian, pendidikan, dan peraturan perundangan**. Salah satu tonggak sejarah perencanaan kota pada masa awal kemerdekaan adalah disetujuinya rencana pembangunan kota satelit Kebayoran Baru, yang dilaksanakan segera pada tahun 1949. Pada tahun 1948-1949 lahir *Staatsblad van Indonesie* dan *Stadsvormingverordening* sebagai peraturan pelaksanaan Ordonansi Pembentukan Kota (*Stadvorming Ordonantie*). Selain itu pada tahun 1948 dibentuklah Komite Peraturan Penataan Ruang di daerah Non Perkotaan (*Regeringscommissie voor de Ruimtelijke Ordening in Nietstedelijke Gebieden*), dengan Thijse sebagai Ketua. Pasca penyerahan kedaulatan (1949) dan penghapusan negara federal (1950), pemerintah Indonesia membentuk kembali pemerintah pusat. Meskipun semula 'tidak' berpengaruh terhadap pandangan tentang perencanaan, yang masih tetap menggunakan peraturan yang ada dan kurikulum pendidikan yang masih mengacu pada paradigma Belanda yang telah lama berakar, pada masa berikutnya, akibat adanya gejolak politik menyangkut Irian Barat, terjadi pergeseran posisi para profesional Belanda yang digantikan oleh orang Eropa lainnya atau orang Amerika Serikat (Roosmalen, 2003).¹

Dalam bidang pendidikan perencanaan, pelajaran tentang *Stedebouwkunde en stadaanleg* (ilmu pembangunan dan pelaksanaan pembangunan kota) dikembangkan oleh Prof. Wolff Schoemaker, Prof. R.L.A.Schoemaker, dan Prof. Thijse di Departemen Ilmu Teknik, Bidang Teknik Sipil di ITB (Sujarto dalam Oetomo, 2003).² Menurut Soefaat (2003),³ adalah Kus Hadinoto yang mencetuskan gagasan dan prakarsa pendidikan tinggi perencanaan dalam kedudukan beliau sebagai Kepala Balai Tata Ruang Pembangunan, Lembaga Tata Ruang pertama di Indonesia, hasil serah terima dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Indonesia pada tahun 1950. Saat itu masalah perencanaan ditangani oleh insinyur sipil yang jumlahnya hanya 60 orang, bekerja di lingkungan Departemen PU di seluruh Indonesia. Kebutuhan akan tenaga perencana diperlukan untuk pembangunan tidak hanya pembangunan perkotaan, namun juga pembangunan perdesaan. Prakarsa mulai muncul dalam rangkaian seminar tentang perencanaan kota pada tahun 1952 dan 1954, yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana PBB (ECAFE). Pemikiran yang muncul saat itu adalah perlunya pembangunan wilayah, selain pembangunan kota, Prakarsa ini didukung oleh Djuanda sebagai Kepala Biro Perancang Negara (Bappenas sekarang) maupun dari kantor perwakilan PBB, yang kemudian memperlakukan beberapa tenaga ahli perencanaan untuk bekerja di Jakarta, Kenneth Watts yang kemudian menjembatani hubungan dengan PBB (Soefaat, 2003). Kebutuhan yang mendesak ini juga berbarengan dengan keinginan

¹ van Roosmalen, Pauline K.M. (2003). Awal Penataan Ruang di Indonesia, dalam Sejarah Penataan Ruang Indonesia 1948-2000. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta Indonesia

² Oetomo, Andi. (2003). Lintasan Sejarah Pendidikan Planologi di Institut Teknologi Bandung, dalam rangka peringatan 50 tahun Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. SAPPK, ITB.

³ Soefaat. (2003). Pembangunan Pendidikan Tinggi Penataan Ruang Pertama di Indonesia, dalam Sejarah Penataan Ruang Indonesia 1948-2000. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta Indonesia

Economic and Social Council PBB untuk mengembangkan pendidikan profesional dalam bidang perencanaan daerah dan kota, sebagai basis penelitian untuk memahami persoalan khusus di berbagai Negara berkembang. Pemerintah Indonesia menerima usulan dari *Harvard Graduate School of Design* untuk pendirian sekolah tersebut. Persiapan dimulai, *senior advisor* PBB, Prof. Martin Meyerson tiba di Jakarta pada tahun 1958, Prof. Kus Hadinoto sebagai Kepala Bagian Bantuan Luar Negeri Departemen PU dan Tenaga Listrik, Ir. Soefaat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kota dan Daerah, serta Kenneth Watts yang sedang mempersiapkan *Master Plan* Jakarta, ikut berperan dalam pengembangan Bagian Perencanaan Daerah dan Kota, yang akhirnya diresmikan oleh Prof. Soemono, sebagai pemimpin ITB, pada tanggal 14 September 1959 (Doebele dalam Oetomo 2003).⁴

Perjalanan panjang tersebut telah membawa banyak perubahan dalam pola pikir pembangunan di Indonesia, setelah satu per satu alumninya menempati berbagai posisi dalam pemerintahan daerah atau memperkuat pasukan pengajar di ITB. Pembentukan lembaga Bapedda di daerah dan Bappenas di Pusat, serta Dinas Tata Kota di berbagai kota besar merupakan salah satu langkah strategis yang telah ditempuh. Lembaga tersebut telah menjadi sarang para perencana yang semula hanya dihasilkan dari pendidikan di ITB, kemudian berkembang di berbagai universitas lain, baik negeri maupun swasta. Sampai tulisan ini diturunkan, jumlah lulusan program pendidikan perencanaan di ITB seluruhnya berjumlah 2.027 sarjana (S1), 883 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (S2) dan 17 Doktor (S3). Sarjana (S1) lulusan dari perguruan tinggi lain, juga sudah banyak dihasilkan, selain mereka yang belajar di berbagai benua.

Meskipun demikian, nampaknya pertambahan jumlah perencana, pengalaman serta pendidikan lanjutan yang telah dijalani oleh para perencana, masih belum dapat menyaingi perkembangan persoalan perencanaan di tanah air Indonesia. Persoalan pembangunan menjadi makin rumit dan ruwet (*sophisticated*), bukan hanya karena luas dan bentuk geografisnya sebagai kepulauan, namun juga keberagamannya dari segala segi – fisik, sosial budaya, sosial ekonomi, pemerintahan dan kepemimpinan serta permasalahan khusus yang dihadapi. Kekuatan pengaruh faktor eksternal yang dapat maupun tak dapat diantisipasi sebelumnya telah menambah rumitnya permasalahan pembangunan wilayah dan kota di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi, pemanasan global dan globalisasi ekonomi, serta perkembangan situasi di dalam negeri seperti otonomi daerah, pemekaran wilayah, berkembangnya peran swasta dan sebagainya ikut menyebabkan terhambatnya pembangunan di sana-sini. Belum lagi dalam dua dekade ini kita banyak mengalami hambatan, dari krisis nasional, terorisme, berbagai wabah, dan bencana alam serta bencana akibat ulah manusia yang telah ikut memporak-porandakan tatanan dan ruang kehidupan masyarakat di berbagai penjuru nusantara.

Tanpa mengurangi penghargaan terhadap hasil yang telah dicapai dalam 50 tahun pembangunan sejak Pelita I yang dimulai tahun 1969, harus diakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum tertangani; bahkan juga terjadi negasi terhadap

⁴ Oetomo, Andi. (2003). *Lintasan Sejarah Pendidikan Planologi di Institut Teknologi Bandung*, dalam rangka peringatan 50 tahun Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. SAPPK, ITB.



hasil pembangunan sebelumnya. Memang ada banyak eksternalitas dalam bentuk krisis moneter dan pergerakan politik sesuai Pembangunan Jangka Panjang Tahap I yang pada satu sisi, mengganggu sistem yang sudah berjalan, tetapi pada sisi lain juga memberi 'kesempatan' untuk perubahan pola pikir. Memasuki era perencanaan yang tidak lagi sekedar mementingkan dimensi fisik dan situasi nasional, namun juga dimensi sosial-politik dan situasi internasional yang dinamikanya makin turbulen. Kalau dipikirkan secara nalar, maka masalahnya terletak pada masalah institusi, yang terdiri dari sumberdaya insani, organisasi maupun regulasi yang diberlakukan. Peran swasta dalam pembangunan makin besar, namun terkadang disertai perilaku yang makin tak terkendali, sementara masyarakat terus menanti tibanya perbaikan lingkungan kehidupan. Kompetensi pemerintah dalam mengelola pembangunan tidak hanya tergantung sang pemimpin tetapi juga sistem yang berlaku, yang harus diikuti. Seringkali rencana yang baik tak dapat diwujudkan dalam kerangka sistem yang ada. Ketimpangan barat-timur, antarpulau, antarprovinsi, antarkabupaten/kota dalam provinsi, antarwilayah perkotaan dan perdesaan masih belum menunjukkan tanda-tanda teratasi. Otonomi daerah yang diberlakukan sejak 1999, ternyata tidak selalu membawa kemajuan, daerah baru hasil pemekaran maupun daerah lama yang ditinggalkan juga ada yang justru mengalami kemunduran. Dari sekian banyak pemerintah kota, pada 2011 ini hanya ada 8 kota yang mendapat penghargaan, dan dari delapan tersebut hanya satu kota di luar Jawa yaitu Sawahlunto yang mendapat penghargaan. Jabatan perencana di pusat maupun di daerah, ternyata tidak selalu dipegang oleh mereka dengan latar belakang pendidikan perencanaan wilayah dan kota; dan mereka juga ada di antara yang berhasil; sementara mereka yang berlatar belakang pendidikan perencanaan tidak merupakan jaminan untuk selalu menunjukkan keberhasilan.

Saat ini lulusan pendidikan perencanaan wilayah dan kota produk dalam maupun luar negeri bekerja di berbagai daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga di berbagai lembaga internasional dan di luar negeri. Mereka juga tersebar dalam berbagai kedudukan di berbagai bidang, dalam sektor swasta dan publik, maupun sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif. Tidak sedikit yang berhasil dalam karir di luar ke-planologi-an. Kontributor tulisan dalam buku ini adalah mereka yang berkecimpung atau terlibat dalam berbagai bidang dan tempat kerja yang dengan berbagai pengalaman panjang dan cara pandang masing-masing, termasuk **Prof. Budhy Tjahjati S. Soegijoko** untuk siapa buku ini didedikasikan, juga berkenan berbagi dengan pembaca semua.

Tulisan para kontributor dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: **Kelompok Pemmasalahan Perencanaan di Indonesia, Kelompok Tantangan Pembangunan Wilayah dan Kota serta Kelompok Pendekatan dan Teknik Perencanaan**, yang kemudian ditutup dengan tulisan Budhy Tjahjati S. Soegijoko tentang **Visi Baru Perencanaan, dari Paradigma ke Praksis**.

Pada **BAGIAN I**, sebagai pembuka **Budhy Tjahjati** menyampaikan permasalahan yang menyangkut pergeseran konsepsi dan pendekatan dalam perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Ada empat hal yang diangkat oleh yang bersangkutan, sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan di Indonesia, yaitu: urbanisasi, globalisasi, lokalisasi, perubahan di Kawasan Asia. Kondisi

pembangunan secara umum maupun khusus di kawasan perkotaan dipaparkan panjang lebar, dari waktu ke waktu, baik yang dilakukan oleh prakarsa pemerintah maupun berbagai program bantuan internasional yang dilaksanakan di berbagai daerah. Pesatnya proses urbanisasi dalam bentuk arus penduduk ke kota besar maupun pergeseran status kawasan perdesaan menjadi perkotaan telah menimbulkan berbagai konsekuensi perencanaan, karena masalahnya makin luas dan multidimensi. Pembangunan Kota bukan lagi hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi menyangkut peningkatan kualitas kehidupan yang mencakup penanggulangan kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, akses kepada pelayanan kesehatan dan pendidikan serta berbagai aspek kemasyarakatan lainnya. Yang bersangkutan kemudian mengaitkan dengan evolusi perencanaan pembangunan dari masa ke masa. Meskipun bahasannya terfokus kepada masalah perkotaan, namun pada bagian akhir tulisannya, Budhy Tjahjati menerawang masa depan perencanaan pembangunan wilayah dan kota. Pendekatan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia yang semula didominasi oleh pendekatan *physical-rational comprehensive-planning* dengan dasar alur pikir analisa kebijakan, karena hambatan ketersediaan data dan kemampuan perencana untuk menangani permasalahan yang makin kompleks, mulai bergeser. Pilihannya adalah memperkecil wilayah perencanaan (perencanaan kawasan) dan atau memfokuskan perencanaan kepada komponen tertentu (misalnya P3KT), dan belakangan dengan perhatian besar kepada masalah kemiskinan, *advocacy*, dan *equity-planning* mulai diterapkan. Konflik sosial yang makin kerap terjadi juga mendorong pendekatan multikultural. Pada kenyataannya Indonesia melakukan keduanya, masih menganut pendekatan fisik komprehensif dilaksanakan oleh lembaga publik, namun pada saat yang sama juga menerapkan pendekatan *advocacy-equity planning* yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Penataan ruang dikemukakan sebagai titik temu untuk menerapkan kedua pendekatan secara paralel. Suatu kerangka menyeluruh diperlukan dan rinciannya dilakukan secara bertahap, *incremental*. Tulisannya diakhiri dengan mengemukakan bahwa perencana mempunyai multiperan, dari sisi teknis *administrative*, penggerak, penengah, wirausaha sampai kepada peran advokasi. Dan apapun peran yang diemban, para perencana wajib memegang etika sebagai perencana yang patuh kepada kaidah keilmuan maupun keadilan sosial. Dalam tulisan berikutnya, secara tegas **Kemal Taruc** menyampaikan bahwa dunia perencanaan ditantang untuk berubah, tidak terkecuali peran institusinya, agar tidak dituduh ikut memporakporandakan hubungan sosial antarmasyarakat, antara masyarakat dan Negara serta antarkota dan daerah sekitarnya. Yang bersangkutan juga berpendapat bahwa pemikiran baru tersebut, sebenarnya sudah ada, namun posisi politik perencanaan kurang kuat. Perencanaan perlu masuk ke dalam agenda politik dan ketegasan bahwa perencanaan berpihak kepada idealisme keberpihakan kepada masyarakat dan lingkungan. Kemal Taruc juga menekankan bahwa perencanaan memerlukan kreativitas dan inovasi menghadapi berbagai permasalahan yang khas dan terus berubah, dan dengan demikian hendaknya perencana jangan dibelenggu dengan ketentuan baku yang justru akan menyebabkan keterikatan dan tidak mendorong untuk berpikir kreatif dan inovatif, 'out of the box'. **Suprayoga Hadi** memposisikan perencanaan pembangunan wilayah dalam konteks percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan



kesenjangan antarwilayah. Berbagai strategi pemerintah melalui program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET, 1996), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KKBPB, 2000), dinilai belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan. Kawasan Perbatasan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK, 2009) serta terakhir pengembangan Koridor Ekonomi dalam Master Plan percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia merupakan strategi lanjutan. Pejabat yang satu ini meyakini peran strategis perencanaan wilayah dalam berbagai bentuknya untuk berfungsi sebagai pedoman jangka panjang di pusat maupun pegangan implementasi di daerah. Meskipun demikian yang bersangkutan juga menengarai adanya ketidakkonsistenan antara satu rencana dengan rencana lain. Dalam perkembangan terakhir, terkait dengan Pengembangan Koridor Ekonomi Nasional yang kemudian dituangkan ke dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, namun belum ada kejelasan dan kepastian, sejauh mana rencana ini mengikat dan dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan pada tingkat nasional maupun di daerah. Suprayoga Hadi meyakini dan melihat jelas peran perencanaan pengembangan wilayah yang menjadi kunci keberhasilan berbagai strategi pembangunan, seperti kawasan strategis dan kawasan perbatasan secara nasional maupun daerah dan akan menjadi *instrument* dalam mewujudkan percepatan dan perluasan pembangunan. Tantangannya adalah agar perencanaan pengembangan wilayah yang diandalkan untuk menjadi kunci keberhasilan seyogyanya disusun dan dirumuskan secara profesional, menyeluruh dan terpadu serta berkesinambungan. **Suhadi Hadiwinoto**, selama perjalanan kerjanya mengamati dan mencatat bagaimana rencana tidak ditaati, justru oleh para pihak yang seharusnya mengawal pelaksanaan rencana tersebut. Hal tersebut disebabkan karena berbagai ketidakmampuan (dan ketidakmauan) untuk menahan berbagai tekanan ekonomi maupun politik. Kenyataan menunjukkan bahwa rencana yang sudah secara baik dipersiapkan, masih perlu dikawal melalui suatu mekanisme yang jelas. Ada banyak hal diluar kewenangan perencanaan yang diperlukan dalam perwujudan suatu rencana. Suhadi menekankan perlunya perencanaan fisik dibarengi dengan strategi ekonomi dan sosial budaya dan membangun mekanisme koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan rencana. Tiga tulisan berikutnya dalam BAGIAN I membahas mengenai beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar ibukota yang tumbuh tak terkendali. **Ridwan Sutriadi** membahas tentang permasalahan *job-housing mismatch* akibat terjadinya perkembangan horizontal yang ekstensif. Yang bersangkutan menampilkan kajian literatur yang intensif untuk bahan perbandingan, serta rujukan yang ditujukan bagi para skolar yang ingin mendalami permasalahan tersebut. Pada dasarnya pembahasan fenomena *job-housing mismatch* ini tidak sekedar ditujukan untuk keseimbangan lingkungan hunian dan ketersediaan lapangan kerja, tetapi mencakup masalah pengelolaan pertumbuhan dan memadukannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara luas. Sekian banyak *lesson learned* yang disampaikan, pada dasarnya menegaskan bahwa perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menunjukkan pengaruhnya terhadap pergerakan perkotaan, para perencana hendaknya mempertimbangkannya dalam perumusan rencana kota dan kebijakan transportasi. Meskipun masih ada yang memilih perjalanan fisik, dengan berbagai

alasan, pengaruh selanjutnya terhadap bentuk dan struktur kota tak dapat dihindari. Perkembangan teknologi tersebut telah mendorong transformasi budaya dari orientasi pergerakan fisik yang berorientasi lokasi (*space of place*), menjadi pergerakan virtual yang berorientasi aliran informasi (*space of flow*). **Hari Ganie** mengamati dan mencatat pengalaman yang terkait dengan lika-liku perkembangan kota baru yang dibangun oleh swasta. Maraknya pertumbuhan kota baru swasta, menurut pengamatannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh para pengembang. Pengembang baru, menurut pandangannya, akan sulit bersaing menghadapi pengembang lama yang sudah memiliki *land bank* dalam jumlah besar. Pengembang skala kecil berupaya dengan jalan 'numpang', memanfaatkan kelengkapan fasilitas yang dibangun oleh pengembang kota baru. Di sisi lain, munculnya produk substitusi yang membangun di 'pusat' kota dan menimbulkan arus *back to the city* merupakan ancaman bagi produk kota baru di kawasan pinggiran, sedangkan pemasok lahan dan pembeli memiliki daya tawar yang makin tinggi. Yang pertama karena ketersediaan lahan yang makin langka, yang terakhir karena banyaknya pilihan produk yang tersedia. Penulis berharap agar persaingan ketat dalam industri kota baru ini justru dapat meningkatkan kualitas produk dan menjadi pelajaran bagi para pihak dalam upaya pembangunan permukiman untuk memenuhi kebutuhan perumahan pada masa mendatang. **Saut Sagala, Pudja Handika dan M. Reza Arisandy**, mengangkat permasalahan yang timbul di Megakota Jakarta, yang makin rentan terhadap bencana dengan menunjukkan berbagai bukti empirik tentang penurunan permukaan tanah akibat perkembangan yang tak terkendali. Penurunan permukaan tanah tersebut diakibatkan oleh pemanfaatan air tanah dalam jumlah yang besar, beban bangunan yang intensif, perubahan fungsi guna lahan, khususnya di bagian dari badan air. Dua contoh megakota dunia: Tokyo dan Seoul diangkat sebagai contoh keberhasilan mengelola megakota melalui institusi khusus yang menangani kebencanaan dan lingkungan, dan langkah-langkah kreatif dalam menghadapi bencana. Harapannya adalah agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menarik pelajaran dari keberhasilan kedua megakota dunia tersebut dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam maupun akibat ulah manusia di Megakota Jakarta.

Pada **BAGIAN II** para penulis menyajikan berbagai tantangan pembangunan, sesuai dengan pengalaman maupun perhatian masing-masing. **Bambang Bintoro Soedjito** dengan pengalaman panjangnya di dunia pendidikan, birokrasi maupun profesi perencanaan wilayah dan kota, memaparkan bagaimana kesungguhan pemerintah untuk menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur wilayah dan kota masih belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pengembangan infrastruktur ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Pemerintah dituntut dengan kompetensi dengan tingkat kerumitan tinggi (*sophisticated*) yang membutuhkan pengalaman dan pemahaman tentang persyaratan kerjasama, aspek pengelolaan dan rancang bangun, serta aspek sosial politik yang melekat pada suatu proyek infrastruktur, jauh lebih rumit daripada pembangunan infrastruktur melalui investasi publik. Catatannya mengungkap bahwa permasalahan tentang masih sedikitnya KPS yang berkembang sampai tahap pelaksanaan disebabkan lukan oleh kurangnya minat investasi,



namun justru oleh kekurangmampuan para pihak untuk menyiapkan portofolio yang dibutuhkan oleh para investor, serta regulasi yang belum mendukung. **Fadjar Hadi Mardiansyah** melakukan penelitian di berbagai daerah untuk mengamati persepsi dan kemampuan pemerintah daerah kabupaten yang menghadapi tingkat urbanisasi tinggi. Dikotomi persepsi tentang 'kota yang memegang status otonomi' dan 'perkotaan' yang tumbuh dan berkembang sebagai bagian dalam proses urbanisasi, serta kekosongan lembaga khusus dalam organisasi pemerintah daerah kabupaten untuk menangani masalah perkotaan atau posisinya yang rendah dalam organisasi pemerintah daerah telah menimbulkan berbagai permasalahan. Perkembangan urbanisasi di berbagai daerah di Pulau Jawa khususnya, memerlukan dukungan institusi, sumber daya manusia, organisasi, dan regulasi pendukung dalam pengelolaan pembangunan wilayah perkotaan. **Suwardjoko P. Warpani**, pemerhati yang jeli, dengan latar belakang pendidikan perencanaan menunjukkan kegelisahannya melihat bagaimana pembangunan (khususnya di Kota Bandung) telah memporakporandakan tatanan mapan, hasil perencanaan sebelumnya. Banyaknya bangunan bersejarah yang 'hilang' dan kawasan yang berubah wajah serta fungsi telah mendorongnya untuk menelusuri berbagai pustaka yang menunjukkan bagaimana Bandung (Kota Bandung dan wilayah sekitarnya) telah difungsikan sebagai pusat kegiatan militer dengan berbagai kawasan dan bangunan penunjang kegiatan. Pada dasarnya pesannya bagi para perencana dan tentu saja para penguasa, adalah agar dalam menyusun rencana dan membangun wilayah atau kota, aspek kesejarahan tidak diabaikan. Yang menarik adalah bahwa penulis yang satu ini mengajak kita untuk mengubah *mindset* atau pola pikir bahwa elemen-elemen sejarah itu hendaknya dimaknai sebagai harta rakyat Indonesia, bukan sebagai peninggalan penjajah yang perlu dimusnahkan. **Deden Rukmana, Djoko S. Abi Suroso** dan **Benedictus Kombaitan** mengangkat permasalahan perubahan iklim dalam kaitannya dengan perencanaan dan penataan ruang. Deden Rukmana menyampaikan peranan dan kontribusi perkembangan kota terhadap iklim global dan mengingatkan tentang tantangan besar yang dihadapi para perencana akibat ketidakpastian dan bentuk dampak yang sangat tidak mudah diprediksi. Kemudian Djoko SAS. dan B. Kombaitan menyampaikan pemikirannya tentang bagaimana penataan ruang dapat berperan dalam adaptasi perubahan iklim di Indonesia dan prioritas atau agenda lima tahun ke depan. Berbagai isu lintas sektor: ketahanan pangan, ketersediaan energi, degradasi lingkungan dan tentu saja penataan ruang perlu mendapat perhatian yang lebih besar dalam lima tahun mendatang. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yang terletak di kawasan dengan resiko tinggi perlu pemutakhiran dengan mempertimbangkan kajian iklim dan mitigasi bencana. Tiga institusi kunci: BAPPENAS, KLH, dan Dewan Nasional Perubahan Iklim perlu untuk sinkronisasi kebijakan dan harmonisasi berbagai produk hukum yang menjadi dasar perencanaan pada berbagai tingkat.

Pada **BAGIAN III**, sekelompok penulis menyampaikan berbagai teknik dan metoda yang diyakini akan meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan. **Ruchyat Deni Djakapermana** mengajukan pendekatan dengan sistem dinamik untuk melakukan analisa yang melibatkan banyak faktor yang saling terkait dalam hubungan yang kompleks. Pendekatan ini sudah diujicobakan di Gorontalo dalam hal ketahanan nasional dan dalam pengembangan wilayah Kalimantan. Piranti

lunak dan teknologi tersedia, namun pendekatan ini juga membutuhkan sekumpulan data dan pemahaman tentang keterkaitan antarsubsistem, antarsektor maupun antarparameter di wilayah yang direncanakan. **Risfan Munir** yang banyak pengalaman mendampingi pemerintah daerah, mengajukan opsi dalam perencanaan. Memadukan teknik analisis yang biasa digunakan, seperti analisis kecenderungan dan proyeksi rasional dengan analisis skenario dalam menghadapi berbagai ketidakpastian akan meningkatkan ketepatan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi. Tentu saja, untuk analisis skenario tersebut perlu juga dilakukan kajian pustaka dan pertimbangan para pakar dalam berbagai bidang terkait sebagai nara sumber, pendapat praktisi, politisi, serta para pihak lainnya yang semuanya berkepentingan terhadap skenario masa depan. **Tatag Wiranto**, setelah melalui perjalanan panjang dalam posisinya dalam birokrasi pemerintahan, meyakini bahwa untuk pembangunan kawasan perdesaan merupakan jawaban terhadap berbagai permasalahan kehidupan masyarakat, kegiatan produksi, kelembagaan sosial ekonomi perdesaan serta lingkungan hidup. Disamping itu juga akan mempunyai dampak terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah, antara kawasan perdesaan dengan perkotaan, maupun keberlanjutan ekosistem. Metoda bedah desa yang dibahas panjang lebar dalam tulisannya dapat digunakan untuk memadukan penyediaan masukan dan proses pembangunan perdesaan, agar tercipta kehidupan perdesaan yang lebih berkualitas. Bantuan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu, diyakini akan merupakan instrumen strategis untuk memajukan daerah tertinggal dan memperkuat posisinya dalam pembangunan nasional. **Bambang S. Priyohadi**, yang *all-out* mengabdikan bakat dan ilmunya di Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan begitu banyak bukti untuk meyakinkan bahwa proses komunikasi merupakan jawaban bagi efektifnya suatu rencana. Kepemimpinan yang diakui masyarakat, perlu ditunjang dengan proses komunikasi substantif dalam bahasa setempat yang disampaikan dengan gaya budaya setempat merupakan kunci pemahaman masyarakat yang menghasilkan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Metoda komunikasi perlu didukung oleh data yang memadai dan pemahaman yang mendalam; membutuhkan kepercayaan antarpara pihak – antara sumber dan sasaran komunikasi. Pembagian peran antarjajaran dalam pemerintahan juga penting dilakukan, kedudukan Kepala Daerah perlu dijaga untuk tidak terlibat dalam hal yang tidak mendasar. Perencanaan sebagai produk yang dinamik dan substansi yang akan dikomunikasikan perlu dihayati benar oleh komunikator. Salah satu sarannya: belajarlah mendengar dari bawah, memahami dan mempertimbangkan sebagai masukan ke dalam perencanaan. Konsistensi dalam sikap dan perilaku dalam membentuk kesepahaman dan kesepakatan perlu dipertahankan untuk keberlanjutan rencana. **Elkana Catur Hardiansah** mengangkat permasalahan membangun partisipasi masyarakat, pendekatan yang dalam dua-tiga dekade ini sangat populer, melalui media sosial. Kesenjangan informasi yang ditengarai sebagai faktor penghambat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dapat diatasi dengan pemajuan teknologi informasi yang didukung oleh UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Media sosial diharapkan dapat menjadikan topik perencanaan sebagai milik masyarakat luas, untuk mendorong kontribusi dan umpan balik serta interaksi antarkelompok masyarakat yang sekarang ini sangat dimungkinkan melalui



berbagai media jejaring sosial, dari blog, wikis dan banyak lagi lainnya. Penggunaan media sosial ini dapat dilakukan untuk semua tahapan dalam proses partisipasi: untuk membangun pengetahuan, pemahaman kepedulian, dan kemudian mobilisasi sosial. **Delik Hudalah, Ishma F. Soepriadi dan Louise Desrainy MP.** mengakhiri BAGIAN III ini dengan mengangkat permasalahan peri-urban, dimana batasan antara kawasan perkotaan dan perdesaan menjadi kabur dan bias. Interaksi terjadi dalam bentuk aliran sumberdaya maupun penduduk, menimbulkan berbagai permasalahan. Sementara permasalahan makin berkembang, definisi dan batasan tentang kawasan peri-urban ini masih menjadi perdebatan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kelompok penulis ini menyampaikan metoda delineasi serta menemukan karakteristik spasial dan sosioekonomi kawasan peri-urban yang dapat membedakan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Rangkaian tulisan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi para pihak yang berkepentingan dalam kapasitas masing-masing untuk mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan wilayah perkotaan maupun perdesaan. Khususnya bagi para perencana generasi ini dan generasi mendatang, pengalaman panjang banyak orang dengan berbagai kedudukan penting/strategis dalam dunia perencanaan sebagai profesional, birokrat maupun pendidik hendaknya dapat diambil sebagai bahan pelajaran tambahan dalam menghadapi tantangan ke depan yang makin berat, luas dan rumit. Semangat untuk berbagi perlu kita lanjutkan sebagai tradisi, untuk saling memperkaya amunisi perencana, saling menguntungkan, dan memperluas wawasan bagi pembaca serta mempererat tali persaudaraan tanpa mengenal batas birokrasi atau batas sosial lainnya. Dengan kebersamaan kita pasti dapat melakukan perubahan!

Bagian akhir buku ditutup pula oleh tulisan **Budhy Tjahjati** yang diberi judul **Mencari Visi Baru Perencanaan, dari Paradigma ke Praksis.** Pada bagian akhir ini yang bersangkutan mengingatkan kembali bahwa dalam perkembangan dunia saat ini, Indonesia sebagai bagian dalam sistem global, mau tidak mau perencanaan pembangunan harus memperhatikan wacana dan arah perkembangan dunia, menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang terbuka, sehingga tentu saja menjadi sangat kompleks. Sambil menghadapi permasalahan global, Indonesia harus menangani masalah nasional, dan subnasional/lokal dengan sistem kepranataannya yang baru: demokrasi dan desentralisasi, urbanisasi dengan segala implikasinya yang memerlukan penyesuaian pola pikir. Keterpaduan kebijakan pembangunan, antar sektor dan antar wilayah, mengarah kepada pembangunan berkelanjutan. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting, namun peranan dunia usaha dan masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Untuk itu perlu penjabaran dan pembagian kerja yang jelas. Budhy Tjahjati juga mengingatkan perlunya suatu arahan pembangunan nasional berjangka panjang yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana jangka menengah dan rencana tahunan baik secara nasional, daerah, maupun sektoral. Tatanan baru dengan berbagai konsep yang masih perlu penjabaran, pemahaman, dan penghayatan, dalam pelaksanaannya belum semuanya dilengkapi dengan aturan-aturan baku, sehingga proses untuk mencapai tujuan menjadi makin penting atau sama penting dengan tujuan itu sendiri.

Diprakarsai oleh :

Kelompok Keahlian Perencanaan & Perancangan Kota (KK-PPK)
Sekolah Arsitektur Perencanaan & Pengembangan Kebijakan (SAPPK)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)

